

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS,  
PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN KOMPETENSI  
APARAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN  
KEUANGAN DANA DESA  
( STUDI KASUS KECAMATAN BREBES )**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Muhammad Rifqi Ma'mun**

**Nim : 31401800111**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2023**

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA  
( STUDI KASUS KECAMATAN BREBES )**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Muhammad Rifqi Ma'mun**

**Nim : 31401800111**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA  
(STUDI KASUS KECAMATAN BREBES)**

**Disusun Oleh :**

**Muhammad Rifqi Ma'mun**

**Nim : 31401800111**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 11 Agustus 2023

Pembimbing,



Devi Permatasari, SE, MSi

NIK. 211413024

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA  
(STUDI KASUS KECAMATAN BREBES)**

**Disusun Oleh :  
Muhammad Rifqi Ma'mun  
Nim : 31401800111**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada Tanggal, 21 Agustus 2023**

**Susunan dewan penguji**

**Pembimbing**

**Devi Permatasari, SE, M.Si  
NIK. 211413024**

**Penguji I**



**Dr. Hj. Indri Kartika, M.Si, Akt, CA  
NIK. 211490002**

**Penguji I**



**Maya Indriastuti, SE, M.Si., Ak., CA, CSRS  
NIK. 211406021**

Digitally signed by Maya Indriastuti  
DN: cn=Maya Indriastuti,  
o=Universitas Sultan Agung  
Semarang, ou=Fakultas Ekonomi,  
email=maya@unissula.ac.id, c=ID  
Date: 2023.08.23 19:49:53 +0700

**Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar  
Sarjan Ekonomi Tanggal, 21 Agustus 2023**

**Ketua Program Studi Akuntansi**



**Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA  
NIK. 211403012**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi Ma'mun  
Nim : 31401800111  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”** adalah hasil karya sendiri dan tidak ada unsur tiruan atau plagiarisme yang tidak sesuai dengan etika keilmuan dan / atau karya ilmiah. Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti melanggar, maka peneliti siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Februari 2023



Muhammad Rifqi Ma'mun

NIM. 3140180011

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi Ma'mun

Nim : 31401800111

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Sripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2023

Yang menyatakan,  
  
METERAI TEMPEL  
10000  
FE9EAAKX289575187

Muhammad Rifqi Ma'mun

Nim. 31401800111

\*Coret yang tidak perlu

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO :**

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah (Umar Bin Khatab)”

### **PERSEMBAHAN :**

“Kepada Allah SWT”

“Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan doa dan biaya”

“Kepada kakak-kakak saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya adik tersayang”



## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa. Populasi pada penelitian ini adalah kepala desa, aparat desa, dan masyarakat desa yang berada di kecamatan brebes. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel pada penelitian ini berjumlah 110 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 29. Hasil uji kualitas data pada uji validitas di setiap masing-masing variabel dinyatakan valid. Kemudian hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Hasil uji asumsi klasik pada uji normalitas kolmogorov smirnov terdistribusi normal. Kemudian hasil uji multikolonieritas pada masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolonieritas. Lalu hasil uji heteroskedastisitas glejser pada masing-masing variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji kelayakan model pada uji f diterima, kemudian nilai  $r$  square 11,3%. Hasil uji t pada variabel transparansi dan kompetensi aparat desa diterima, sedangkan variabel akuntabilitas dan partisipasi masyarakat ditolak.

**Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa, Pengelolaan Dana Desa.**

## ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and test the effect of transparency, accountability of community participation, and competence of village officials on managing villages funds. The population in this study were village heads, village officials, and village communities in the brebes sub-district. The sample in this study used a purposive sampling method. The sample in this study amounted to 110 respondents. Data collection techniques using the questionnaire method. The data analysis method used was multiple linear regression analysis using the SPSS version 29 program. The results of the data quality test on the validity test for each variable were declared valid. Then the results of the reliability test on each variable are declared reliable. The results of the classical assumption test on the kolmogorov smirnov normality test are normally distributed. Then the results of the multicollinearity test on each independent variable do not occur multicollinierity. Then the results of the glejser heteroscedasticity test on each independent variable did not occur heteroscedasticity. The results of the model feasibility test on the f test are accepted, then the value of r square is 11,3%. The result of the t test on the variables of transparency and competence of village officials are accepted, while the variables of accountability and community participation are rejected.

**Keywords : Transparency, Accountability, Community Participation, and Competence Of Village Officials, Management Of Village Funds.**

## INTISARI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini diperkuat dari beberapa research gap atau sumber dari jurnal penelitian terdahulu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Stewardship. Hipotesis yang diajukan,  $H_1$  : Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa,  $H_2$  : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa,  $H_3$  : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa,  $H_4$  : Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi pada penelitian ini kepala desa, aparat desa, dan masyarakat desa yang berada di Kecamatan Brebes dan sampel sebanyak 110 responden. Sumber data menggunakan data primer, metode pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner. Uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji kelayakan model, dan uji hipotesis.

Hasil uji kualitas data pada uji validitas pada masing-masing variabel dinyatakan valid. Kemudian hasil uji kualitas data pada uji reliabilitas pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Hasil uji asumsi klasik pada uji normalitas kolmogorov smirnov terdistribusi normal. Kemudian hasil uji multikolonieritas pada masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolonieritas. Lalu hasil uji heteroskedastisitas glejser pada masing-masing variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji kelayakan model pada uji f diterima, hasil uji kelayakan model pada uji r square bernilai 11,3%. Hasil uji hipotesis uji t pada masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa,  $H_1$  : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa,  $H_2$  : Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa,  $H_3$  : Partisipasi Masyarakat tidak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, H<sub>4</sub> : Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi syafaat kepada umatnya sampai hari akhir.

Dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini, dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Brebes)” guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, motivasi, dan bimbingan dari pihak lain. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulisty, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi arahan, bimbingan, dan kelancaran dalam layanan akademik
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi arahan, bimbingan, dan kelancaran dalam layanan akademik.

3. Ibu Devi Permatasari, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Ibu Somarti dan Bapak Sumitro tercinta selaku orang tua yang telah memberikan motivasi, semangat, arahan, nasihat, doa, biaya dan fasilitas kepada penulis.
6. Kakak Novi Intania Sari dan Vicky Nur Fauziah selaku kakak kandung yang baik yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta arahan kepada penulis.
7. Diri saya sendiri yang tidak pernah menyerah dan putus asa dalam menyusun Pra Skripsi ini.
8. Semua teman-teman Mega Dinda Okvita, Dina Baktiani, Hanif, Rifki Faisal yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang sudah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna dan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dari penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

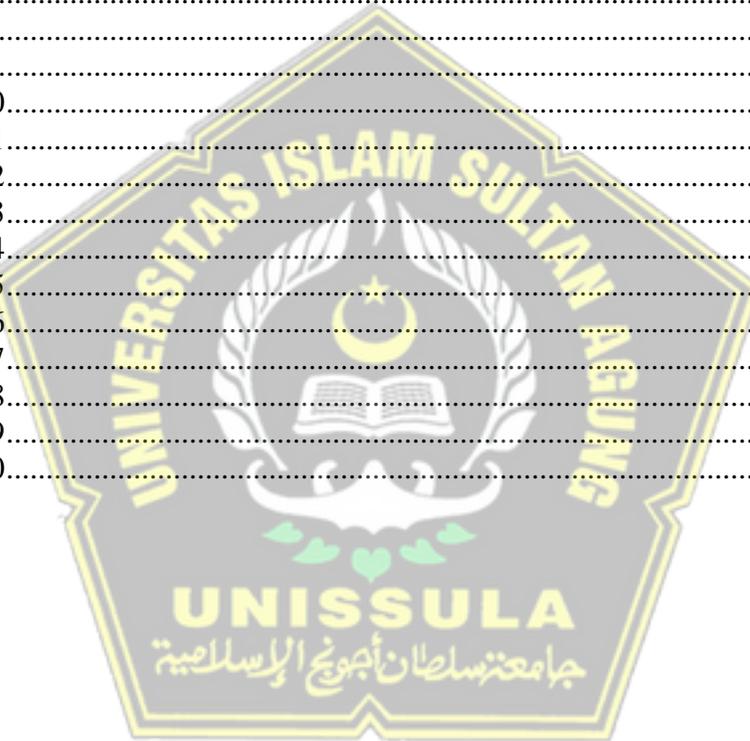
## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	xvi
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Stewardship.....	12
2.2 Variabel Penelitian.....	13
2.2.1 Transparansi.....	13
2.2.2 Akuntabilitas.....	16
2.2.3 Partisipasi Masyarakat.....	18
2.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa.....	20
2.3 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	24
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	27
2.5 Pengembangan Hipotesis.....	28
2.5.1 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	28
2.5.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	29
2.5.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Populasi dan sampel.....	34
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	36
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.5 Variabel dan Indikator.....	37
3.5.1 Variabel dan Indikator.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	44
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	44
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	45

3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	46
3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	47
3.6.4.1.1 Uji F .....	48
3.6.5 Analisis Uji Hipotesis .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	51
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
4.1.2 Karakteristik Responden .....	52
4.2 Analisis Deskriptif Variabel .....	55
4.2.1 Analisis Deskriptif Jawaban Responden .....	55
4.3 Analisis Data.....	59
4.3.1 Statistik Deskriptif.....	59
4.3.2 Uji Kualitas Data .....	61
4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	66
4.3.5 Uji Kelayakan Model .....	68
4.3.6 Uji Hipotesis .....	69
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	71
4.4.1 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa.....	71
4.4.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa.....	72
4.4.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa ..	73
4.4.4 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Implikasi .....	78
5.2.1 Implikasi teoritis.....	78
5.2.2 Implikasi Praktis.....	80
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	80
5.4 Agenda Penelitian Mendatang .....	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator .....	38
Tabel 4. 1.....	51
Tabel 4. 2.....	52
Tabel 4. 3.....	53
Tabel 4. 4.....	53
Tabel 4. 5.....	54
Tabel 4. 6.....	55
Tabel 4. 7.....	56
Tabel 4. 8.....	57
Tabel 4. 9.....	58
Tabel 4. 10.....	59
Tabel 4. 11.....	60
Tabel 4. 12.....	62
Tabel 4. 13.....	63
Tabel 4. 14.....	64
Tabel 4. 15.....	65
Tabel 4. 16.....	66
Tabel 4. 17.....	66
Tabel 4. 18.....	68
Tabel 4. 19.....	69
Tabel 4. 20.....	69



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan suatu pemerintahan yang mempunyai hak otonomi adat, sehingga merupakan suatu badan hukum dan menempati suatu wilayah tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Akil Rahman, 2016.) Masyarakat desa mempunyai ikatan batin yang kuat baik karena faktor keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, struktur pengelolaan yang dimiliki bersama, kekayaan dalam jumlah tertentu, dan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Wida, 2016). Desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil dalam kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Sebagai organisasi pemerintahan, desa menjadi tolok ukur keberhasilan dalam segala urusan pemerintahan. Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan, maka pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus terhadap realisasi tujuannya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, desa kerap diidentikkan dengan kemiskinan dan keterbelakangan karena kurang mendapat perhatian pemerintah pusat dibandingkan masyarakat perkotaan. Secara bertahap, pemerintah mulai menyalurkan dana desa karena tanpa pendanaan, desa akan kesulitan melaksanakan dan memberdayakan masyarakat desa secara efektif (Purba, 2020).

Era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal yang berkonsentrasi pada pemerintah daerah telah mempercepat perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia. Globalisasi yang pesat, yang menuntut adanya daya saing di setiap negara, juga menuntut adanya daya saing di setiap pemerintahan daerah, yang diharapkan dapat dicapai dengan meningkatkan kemandirian pemerintah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan dilaksanakannya berbagai reformasi akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah guna memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara (Sukhemi 2010). Akuntansi pemerintahan berperan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tata kelola keuangan yang efektif, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, dan desa. Prinsip-prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan publik tidak hanya merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah pusat tetapi juga dari daerah seperti desa (Kisnawati, Astini, & Oktaviani, 2018). Desa merupakan unit organisasi pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan segala latar belakang, kepentingan, dan kebutuhan memegang peranan yang sangat penting.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Republik Indonesia (UU No. 6 tahun 2014). Desa disebut kabupaten, yang merupakan kependekan dari

kabupaten hukum yang berarti “desa rakyat”. Menurut peraturan nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri disebutkan bahwa keuangan desa mencakup segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berwujud. uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa juga wajib dicatat. ditangani secara tertib dan berpegang pada anggaran yang telah ditetapkan dengan tetap berpegang pada cita-cita transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Pengelolaan keuangan desa kini banyak menuai perhatian dan kontroversi. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa penanggung jawab desa adalah pemegang kekuasaan dan bertanggung jawab atas pembagian uang desa untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara menyediakan pembiayaan bagi desa, dengan tujuan mendorong pemerataan pembangunan desa dan mengurangi dampak kemiskinan dan kesenjangan. Menurut statistik yang diberikan pemerintah, dana desa sebesar Rp. 20,7 triliun dialokasikan pada tahun 2015. Anggarannya meningkat menjadi Rp. 46,9 triliun pada tahun 2016, dan kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun

pada tahun 2017. Pengelolaan keuangan desa sangat penting karena berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, menghilangkan kemiskinan, dan mengentaskan kemiskinan. kesenjangan pembangunan antar desa, dan membangun masyarakat. Konsep desa dalam kaitannya dengan pembangunan. Selain itu, pentingnya penelitian ini terletak pada tujuan untuk mempelajari tentang pengelolaan keuangan desa yang akan diteliti.

Menurut Mardiasmo, (2018) transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam penyediaan informasi serta kemudahan akses terhadap informasi yang tepat dan jujur bagi masyarakat umum. Masyarakat diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan, tujuan, dan pemenuhan kebutuhan mereka ketika ada transparansi dalam pemerintahan. Ketersediaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan adalah hal yang dimaksud jika kita berbicara tentang transparansi keuangan desa. Menurut Windyastuti *et al.*, (2019) hadirnya konsep transparan ini akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dapat mencapai tingkat keberhasilan setinggi-tingginya dan terhindar dari kecurangan. Penelitian terdahulu (Mukmin & Maemunah, 2018; Nazar *et al.*, 2021; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Windyastuti *et al.*, 2019) menunjukkan bahwa hasil variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun terdapat pula gap penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa temuan variabel transparansi tidak mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan

dana desa (Angelia *et al.*, 2020; Yanto & Aqfir, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penyelidikan lebih lanjut mengenai topik ini.

Penerapan konsep akuntabilitas merupakan salah satu hal penting yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi syarat pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk tujuan pelaporan kepada pemerintah federal dan daerah, namun juga dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab tidak langsung kepada masyarakat. Selain itu, konsep akuntabilitas memberikan gambaran keberhasilan kinerja pembangunan yang telah dicapai di desa, yang menjadi landasan tujuan dan prioritas yang dimasukkan dalam anggaran desa. Menurut (Mustofa, 2012) akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berhasil tidaknya pemerintahan desa dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa terhadap seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan membuka pengawasan keuangan desa kepada masyarakat. Dengan kata lain, akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berhasil tidaknya pemerintahan desa. dan transparan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala yang memuat informasi yang dapat diakses dan diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Penelitian sebelumnya (Angelia *et al.*, 2020; Mukmin & Maemunah, 2018; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Windyastuti *et al.*, 2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas memberikan dampak menguntungkan terhadap pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya (Yanto & Aqfir,

2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi pengelolaan dana desa sama sekali.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memegang peranan penting dalam pembangunan dan pembangunan desa. Partisipasi dari anggota masyarakat dapat berdampak pada proses peninjauan dan pengaturan operasional pemerintah, yang pada gilirannya dapat membatasi jumlah kasus dimana masyarakat menentang otoritas. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga berupaya untuk menghasilkan anggaran yang efisien karena dapat memberikan gagasan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan anggaran (Putra & Rasmini, 2019). Setiap tahapan proses pengelolaan dana desa, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, harus didasarkan pada mekanisme pembangunan partisipatif yang bertumpu pada peran aktif masyarakat desa, sebagaimana tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan tersebut dapat dilihat di website Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat mempunyai pengaruh yang baik terhadap pengelolaan dana desa (Mukmin & Maemunah, 2018; Masruhin & Kaukab, 2019; Angelia *et al.*, 2020). Namun demikian, terdapat juga penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berdampak kecil terhadap pengelolaan dana desa (Yanto & Aqfir, 2020; Nazar *et al.*, 2021).

Menurut Mahayani (2017) kemampuan aparat desa, keterlibatan masyarakat, dan kepemimpinan kepala desa merupakan tiga variabel yang paling signifikan

mempengaruhi tercapainya keberhasilan pembangunan desa. Untuk mewujudkan konsep pengelolaan dana desa yang kredibel, diperlukan perangkat desa yang kompeten, komponen pengawasan, dan pelaksanaan audit yang profesional (Purti, 2015). Menurut (Mahayani, 2017) salah satu penyebab tidak efektifnya pengelolaan dana desa adalah rendahnya kemampuan aparat desa dan buruknya kinerja mereka dalam bidang administrasi keuangan desa. Menurut (Ferina *et al.*, 2016) agar aparat desa dianggap memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya, mereka perlu memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta pengalaman kerja yang relevan. Karena mereka merupakan salah satu motor penggerak pemerintah, maka perangkat desa memang harus mempunyai kompetensi karena mereka harus mampu memberikan kontribusi seefektif mungkin terhadap terwujudnya visi, maksud dan tujuan pemerintah itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kompetensi pejabat mempunyai pengaruh positif terhadap penatausahaan uang desa (Masruhin & Kaukab, 2019). Temuan ini memperkuat pernyataan bahwa hal ini memang benar adanya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rakhma & Maryono (2022) keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Wanasari tidak memiliki dampak yang signifikan. Informasi yang tersedia bagi masyarakat setempat dan dapat diakses oleh mereka dalam bentuk papan informasi dan pengumuman. Alasan akuntabilitas mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Wanasari adalah karena pemerintah menjaga tingkat akuntabilitas yang sangat baik dan optimal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rakhma & Maryono (2022). Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian dari Rakhma & Maryono (2022) berfokus meneliti di lokasi Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sedangkan penelitian ini berfokus untuk meneliti tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Penelitian ini penting untuk diteliti, karena anggaran dana desa di kecamatan brebes sebesar Rp 8,213,866,000 yang memiliki ranking 10 lebih sedikit anggarannya dibandingkan dengan desa yang berada di kecamatan lainnya di kabupaten brebes (Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes). Pemerintah melalui menteri keuangan republik indonesia menekankan agar penggunaan dana desa tahun 2023 agar fokus ke beberapa kegiatan yang menjadi penekanan pemerintah diantaranya penanganan kemiskinan ekstrim serta penguatan ketahanan pangan, disamping tetap ada pencegahan dan penanganan bayi stunting. Dari data pemantauan status gizi pada tahun 2018, stunting di kecamatan brebes sebesar 28 persen, angka ini jauh dari target nasional yang menargetkan 14 persen pada tahun 2024, perlu adanya upaya yang menyeluruh dalam mencapai target tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Brebes, dan bagaimana Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Brebes.

Berdasarkan informasi latar belakang yang disajikan di atas, terdapat kesenjangan penelitian dalam penelitian yang dilakukan di masa lalu, yang menyebabkan perbedaan

dalam hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa pada masyarakat yang membentuk Kabupaten Brebes dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat transparansi, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, dan tingkat keahlian yang dimiliki oleh perangkat desa. Temuan penelitian ini diyakini mampu menjadi sumber referensi bagi para peneliti di tahun-tahun mendatang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Desa yang menjadi bagian dari kegiatan pembangunan tentu tidak dapat dipisahkan dari komponen dan lapisan masyarakat yang berada di dalamnya. Baik dari pemerintah setempat maupun masyarakat di kota kecil. Desa dibekali kemampuan mengelola keuangannya sendiri sebagai bagian dari langkah awal yang diambil pemerintah. Hal ini dilakukan melalui pemberian alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendapatan desa. Menurut (Wiratna, 2015:27). agar pengelolaan ADD dapat berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan desa, maka perlu berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan. Adapun permasalahan lain yang ingin penulis teliti antara lain mengenai penerapan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa, penulis ingin mengkaji apakah sistem yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sekarang berada di tempatnya. Oleh karena itu, ketiga prinsip tersebut memberikan

dampak yang menguntungkan bagi upaya pembangunan desa, yang berujung pada perubahan dalam pembangunan desa itu sendiri, dan dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji ketiga prinsip tersebut. Sebab, hal tersebut membawa perubahan pada pembangunan desa itu sendiri. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa?”

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka daftar pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa?
4. Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian bertujuan untuk menguji, memperoleh bukti, dan menganalisis mengenai :

1. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa
3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dana desa
4. Pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat penelitian yang telah digunakan penelitian. Berikut manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat dari segi teoritis

Manfaat bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai topik tersebut.

2. Manfaat dari segi praktis

Bagi pengelola dana desa diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan pengelolaan keuangan desa seperti meningkatkan kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dalam menyajikanya serta manfaat bagi peneliti dan masyarakat yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Stewardship**

Teori Stewardship adalah paradigma baru yang didirikan oleh Donaldson and Davis (1991) untuk menilai ada atau tidaknya hubungan antara pemilik bisnis dan manajemen perusahaan tersebut. Ketika teori penatalayanan organisasi diterapkan, penekanannya ditempatkan pada harmonisasi upaya para pelaku dan manajer modal (stewards) menuju pencapaian tujuan bersama. Teori ini memberikan penjelasan atas keadaan yang dialami para manajer, sehingga memungkinkan mereka termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang paling penting dan mencapai kesuksesan dibandingkan dengan kepentingan pribadi mereka. Menurut gagasan ini, manajemen (pengurus) memperoleh dorongan untuk bertindak dari persyaratan dan preferensi kepala sekolah. Selain itu, manajemen cenderung menunjukkan perilaku loyal terhadap perusahaan karena bekerja keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Pendekatan ini berlaku untuk penelitian akuntansi yang dilakukan di sektor publik, seperti yang dilakukan oleh entitas pemerintah (Thorton, 2009). Kantor akuntan yang melayani sektor publik, sejak awal evolusinya, telah diperlengkapi dengan baik untuk memenuhi persyaratan informasi yang ditentukan oleh hubungan hierarki yang ada antara pengelola dan pelaku. Semakin sulit bagi kepala sekolah untuk melakukan kegiatan pengelolaannya sendiri sebagai akibat dari keadaan yang semakin rumit dan meningkatnya kebutuhan akan tanggung jawab dalam organisasi sektor publik. Kajian

ini mempunyai keterkaitan dengan pengertian stewardship karena menunjukkan bahwa dalam interaksi antara masyarakat sebagai kepala sekolah dan pemerintah desa sebagai steward, pemerintah desa mempunyai kekuasaan yang cukup besar. Mengacu pada akuntabilitas pengelolaan uang desa, maka dimana pemerintah desa dituntut untuk mampu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan teori stewardship karena menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan mampu menjadikan akuntabilitas keuangan yang dipercayakan kepadanya sehingga tercapai tujuan perekonomian. dapat terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara efektif. Teori stewardship juga menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Transparansi**

Menurut (Kristianten, 2016), transparansi mengacu pada kesiapan pemerintah untuk memberikan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan terkait dengan tindakan yang melibatkan administrasi sumber daya publik. Menurut (Kristianten, 2016), ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kriteria transparansi anggaran, yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran antara lain:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran
- b. Kerangka regulasi untuk memastikan transparansi

- c. Keterbukaan proses
- d. Keterbukaan, transparansi, dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

Transparansi sebagai prinsip yang memastikan bahwa setiap orang dapat dengan bebas memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai (Krina, 2012). Transparansi berarti masyarakat harus memiliki akses yang bebas dan mudah terhadap informasi tentang proses dan pelaksanaan dan ketetapan yang diambil (Hidayat, 2017). Berdasarkan pengertian-pengertian transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat terkait kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan laporan hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) mengemukakan 6 prinsip transparansi, diantaranya:

- a. Masyarakat mudah memahami dan memperoleh suatu informasi, antara lain informasi terkait dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program
- b. Terdapat publikasi dan media yang terkait dengan sistem aktivitas dan perincian keuangan
- c. Masyarakat dapat memperoleh laporan rutin tentang penggunaan sumber daya dalam pengembangan proyek
- d. Laporan tahunan
- e. Website atau media publikasi organisasi

f. Prinsip dalam penyaluran laporan

Manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut Randi R.W (2014)

antara lain:

- a. Mencegah korupsi
- b. Memperkuat kepercayaan terhadap tanggungjawab pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- c. Meningkatkan kohesi sosial, karena akan membentuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
- d. Lebih mudah mendapati kelemahan dan kekuatan kebijakan
- e. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat dapat mengukur kinerja pemerintahan dengan lebih baik

Sementara itu, menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), keunggulan dari transparansi terletak pada penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berlandaskan pertimbangan bahwa publik mempunyai hak untuk memahami secara terbuka dan menyeluruh terkait pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. Dan kepatuhan pemerintah terhadap segala peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian transparansi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai pembuat, pelaksana serta penanggung jawab dari segala macam kebijakan yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya. Transparansi yang dikemukakan meliputi pemerintah memberikan

akses yang jujur dan benar kepada publik untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Setiap masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan anggaran

### **2.2.2 Akuntabilitas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 akuntabilitas menjadi salah satu prasyarat untuk implementasi tata pemerintah yang baik (Good Governance). Akuntabilitas adalah dasar utama terjadinya sistem pemerintahan yang baik menjadi salah satu bahan referensi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam beberapa pengertian, akuntabilitas biasanya berhubungan dengan prosedur tanggungjawab atas berbagai layanan yang diberikan atau yang telah dilakukan.

Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau jawaban serta menjelaskan kinerja dan perilaku individu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban (Sedarmayanti, 2014). Sistem akuntabilitas ini merupakan bentuk transparansi dari kegiatan yang dilakukan maupun prosedur yang dilakukan. Akuntabilitas tidak terbatas pada menyatakan hasil secara tertulis melalui laporan secara periodik, namun pelaksanaan yang sebenarnya.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala (Syahriyatul, 2017). Dalam

melaksanakan akuntabilitas lembaga pemerintah adalah fondasinya (Rakhmat, 2017), yaitu:

- a. Pemimpin instansi pemerintah yang bersangkutan dan seluruh pegawai harus mempunyai komitmen
- b. Harus ada prosedur yang dapat memastikan penggunaan sumber daya yang persisten dan mematuhi peraturan perundang-undangan
- c. Mampu membuktikan tingkat perolehan tujuan dan target yang telah diatur
- d. Fokus pada realisasi misi serta hasil dan faedah yang diperoleh
- e. Mendorong perubahan dalam manajemen instansi pemerintah harus objektif, transparan, dan inovatif

Menurut Sulistoni (2013) terdapat beberapa ciri pemerintah yang akuntabel diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan keterangan kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat
- b. Menyajikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat
- c. Memaparkan serta mempertanggungjawabkan tiap-tiap kebijakan publik secara proposional
- d. Menyajikan ruang kepada publik berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan
- e. Publik memiliki tujuan untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui sistem akuntabilitas publik, publik dapat menilai sejauh mana penyelesaian pelaksanaan rencana / kegiatan pemerintah

Mardiasmo (2016) mengemukakan dalam akuntabilitas publik terdapat dua macam akuntabilitas diantaranya akuntabilitas vertikal (Vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal (Horizontal accountability) yang mempunyai definisi sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas vertikal (Vertical accountability) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, seperti tanggungjawab kepada unit-unit (dinas) kepada pemerintah daerah, tanggungjawab daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR
- b. Akuntabilitas horizontal (Horizontal accountability) mewujudkan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat.

### **2.2.3 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan suatu masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang mampu menyalurkan ambisi masyarakat. Partisipasi bergantung pada kebebasan berserikat dan berekspresi, serta kemampuan memecahkan masalah secara kreatif (Mardiasmo, 2018: 23). Keterlibatan masyarakat umum diperkirakan akan menghasilkan diskusi yang bersifat instruktif dan kooperatif di antara berbagai pemangku kepentingan mengenai ekonomi, sumber daya, komunitas lokal, lingkungan alam, dan aktivitas terkait yang dilakukan oleh organisasi. Partisipasi masyarakat merupakan instrumen penting untuk membangun aliansi, pengetahuan, dan komitmen yang diperlukan untuk memutuskan kebijakan yang akan diberlakukan oleh

penyelenggara. Upaya yang perlu dilakukan agar proses pelibatan masyarakat dapat dipercaya, responsif, dan seimbang. Untuk melakukan hal ini, peluang yang jelas bagi masyarakat untuk terlibat perlu diberikan, dan proses pengambilan keputusan harus dibuat terlihat jelas dan responsif terhadap masukan dari masyarakat. Masukan tersebut bisa berupa ide, tenaga, waktu, keahlian, sumber daya keuangan, atau materi, dan masyarakat perlu melihat bagaimana kontribusinya (Webler et al., 2001) diperhitungkan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Menurut Hamijoyo (2007), terdapat berbagai cara yang berbeda dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pembangunan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan masukan kepada masyarakat. Berikut ini contoh jenis partisipasi masyarakat :

- a. Partisipasi uang
- b. Partisipasi harta benda
- c. Partisipasi tenaga
- d. Partisipasi keterampilan
- e. Partisipasi buah pikiran
- f. Partisipasi sosial

#### **2.2.4 Kompetensi Aparat Desa**

Menurut Mardiasmo (2018) penerapan prinsip kompetensi pejabat pemerintah yang baik dapat dilakukan dengan mempertahankan pejabat yang ahli dan profesional dan melakukan penguatan secara berkala untuk meningkatkan output dan impact, mengadakan seminar motivasi bagi pejabat publik agar selalu meningkatkan

kinerjanya. , serta menerapkan metode dan prosedur praktis yang dapat digunakan untuk mengubah keterampilan menjadi kemampuan, sehingga memberikan sumber daya kinerja yang lebih optimal. [butuh rujukan] Efisiensi aparatur pemerintah sangat penting untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah secara efektif dan pertumbuhan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aparatur pemerintah dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan setara. Layanan ini harus didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selain itu, anggota aparatur wajib melaksanakan tanggung jawabnya secara beretika, bertanggung jawab, dan bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi (KKN). Menurut Hardiyansyah (2012), proses pemilihan dan pengangkatan aparatur pemerintah didasarkan pada evaluasi objektif terhadap prestasi individu, tingkat kompetensi, dan tingkat pelatihan (Hardiyansyah, 2012).

#### **2.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur bahwa Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban seluruh desa, yang dapat dinilai dalam segala bentuk uang dan produk yang berkaitan dengan pelaksanaan Desa. hak dan kewajiban desa. Peraturan ini disahkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan asli desa (PAD), pendanaan pemerintah, dan keuntungan badan usaha milik desa (BUMDes) menjadi kontributor utama pembiayaan desa. APBD bertanggung jawab mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa untuk urusan pemerintahan daerah, sedangkan

APBN bertanggung jawab mendanai pembiayaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh penyelenggaraan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan desa. Dengan mengikuti tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa, pekerjaan yang lebih baik dapat dilakukan. Tahapan atau siklus tersebut adalah sebagai berikut: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Menurut (Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa pendapatan desa berasal dari :

- a. Pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil pengelolaan desa, hasil kekayaan desa, hasil gotong royong dan partisipasi, hasil gotong royong, dan penghasilan lain yang sah yang berasal dari desa
- b. Pembagian pendapatan pajak daerah antara Kabupaten dan Kota paling sedikit sebesar 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten dan Kota yang sebagian besar diberikan kepada desa
- c. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit sebesar 10%, dan dana tersebut harus dialokasikan kepada setiap desa secara proporsional guna memenuhi kebutuhan keuangan desa

- d. Bantuan keuangan dari pemerintah federal, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah atau kota yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan
  - e. Pemberian dan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat secara hukum
- Berdasarkan berbagai definisi yang telah ada, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup segala tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang dilakukan. sudah dilakukan.

Dengan terwujudnya pengelolaan sumber daya keuangan desa yang efektif dan efisien, maka pelaksanaan program otonomi daerah akan semakin berhasil, dan pengelolaan desa tersebut dikenal dengan manajemen keuangan desa. Seperti yang dikemukakan Waluyo (2011) bahwa pemahaman terkait anggaran daerah dapat dipahami melalui seluruh pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indeks kesuksesan pembiayaan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber daya publik dalam mendanai kegiatan pembangunan yang dijalankan.

Anggaran daerah adalah komponen dari pengelolaan keuangan daerah secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan strategi kerja pemerintah daerah dalam mata uang (rupiah) dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) (Mardiasmo, Barnes dan Sakurai, 2016). Berbagai wujud organisasi, sektor swasta atau sektor masyarakat pasti akan membuat anggaran yang

pada dasarnya mewujudkan salah satu cara untuk mewujudkan visi dan misinya (Mardiasmo, 2016). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus diikuti, yaitu sebagai sarana pengendalian kebijakan keuangan daerah. Sebagaimana dikemukakan (Mardiasmo (2016), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah melingkupi akuntabilitas, value for money, transparansi, kontrol, dan kredibilitas.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian sebelumnya mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dana desa ditunjukkan pada tabel berikut ini:



**Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
1.	Aulia Rakhma Larasati Putri dan Maryono (2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Kompetensi Aparat Desa</li> <li>- Pengelolaan Dana Desa</li> </ul>	<p>Transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa</p>
2.	Risya Umami dan Idang Nurodin (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Pengelolaan Keuangan Desa</li> </ul>	<p>Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa</p>

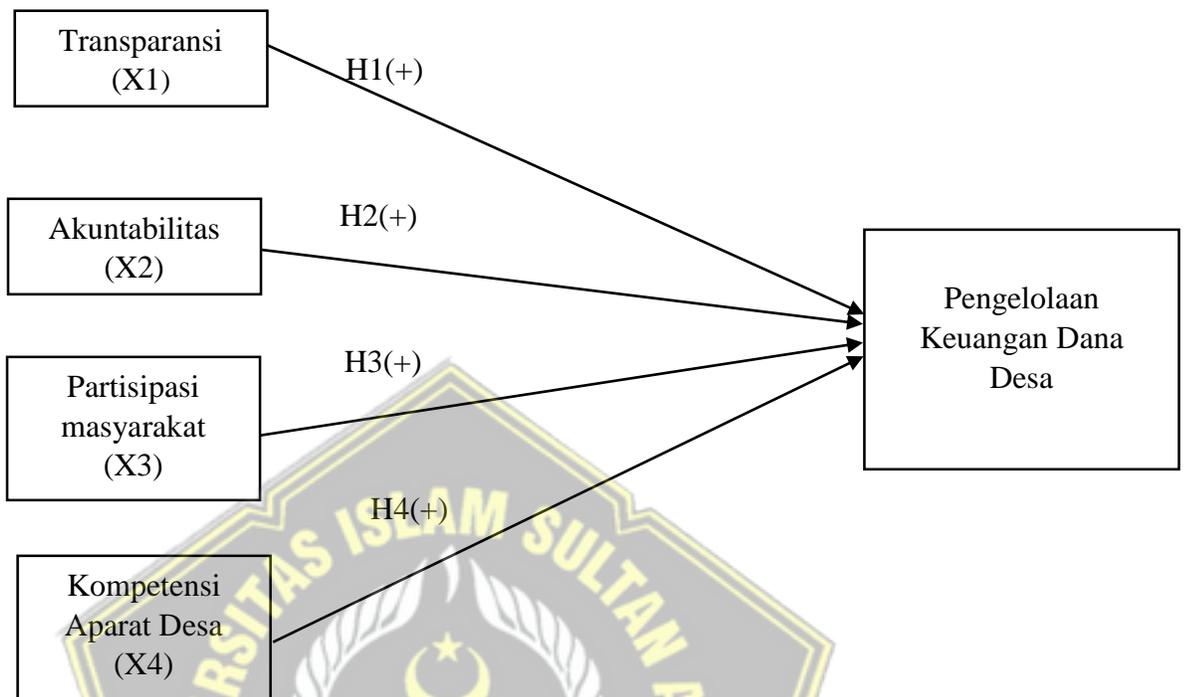
3.	Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Pengelolaan Dana Desa</li> </ul>	Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa
4.	Ediska Harosa Putri, Witra Maison, dan Rita Dwi Putri (2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Pengelolaan Keuangan Desa</li> </ul>	Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
5.	Anita Firdaus, Suharno, dan Sunarti (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Pengelolaan Alokasi Dana Desa</li> </ul>	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

6.	Putra Adi Kurniawan (2019),	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Peran Perangkat Desa</li> <li>- Pengelolaan Keuangan Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>-Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa</li> </ul>
7.	I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Efektivitas Pengelolaan Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa</li> </ul>

8.	Fauzana Azima, Annie Mustika Putri, dan Intan Putri Azhari (2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Transparansi</li> <li>- Pengawasan</li> <li>- Pengelolaan Alokasi Dana Desa</li> </ul>	-Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa -Transparansi dan Pengawasan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
9.	Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, Adhitya Bayu Suryantara (2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Peran Perangkat Desa</li> <li>- Pengelolaan Keuangan Desa</li> </ul>	Transparansi, Akuntabilitas, Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

#### 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini hendak menguji pengaruh variabel Independent (Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Keuangan Dana Desa).



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Transparansi lebih diutamakan dalam pengelolaan sumber daya keuangan masyarakat, maka penerapan sistem pemerintahan yang baik pada dasarnya bergantung pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, penyediaan akses informasi yang mudah, dan dorongan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan. dan setiap kegiatan pemerintahan (Mukmin & Maemunah, 2018).

Disebutkan bahwa steward adalah orang-orang yang akuntabel dan dapat dipercaya, dan karena hal ini dapat dicapai melalui penerapan konsep transparansi,

premis teori stewardship tentang tanggung jawab dan dapat dipercaya dianut. Dimana pemerintah desa menyediakan informasi mengenai pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa, kepada masyarakat luas dan memberikan akses yang luas terhadap informasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya asimetri informasi yang dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Pengurus yang juga dikenal sebagai perangkat desa ini akan selalu berupaya menerapkan prinsip transparansi yang tinggi agar dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat. Dengan demikian, para pengurus dapat melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dan terjalinnya kemitraan yang kokoh antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, dapat dibangun pemikiran bahwa keterbukaan dan transparansi mempunyai pengaruh yang menguntungkan terhadap pengelolaan keuangan uang desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa (Mukmin & Maemunah, 2018; Windyastuti., 2019; Angelia *et al.*, 2020; Nazar *et al.*, 2021).

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

### **2.5.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Hal ini dapat berupa penyampaian, presentasi, atau pelaporan tindakan melalui laporan keuangan kepada kepala sekolah karena akuntabilitas lebih diutamakan dalam pengelolaan uang desa (Yanto & Aqfir, 2020). Akuntabilitas diartikan sebagai tindakan memberikan informasi mengenai operasional dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik tersebut.

Sesuai dengan konsep pedoman teori stewardship, maka merupakan kewajiban steward untuk mengungkapkan kepada publik hasil evaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, akuntabilitas merupakan wujud kewajiban pramugara (perangkat desa) kepada pimpinan di atasnya maupun kepada kepala sekolah (masyarakat desa) atas kinerja penyelenggaraan urusan desa. Akibatnya, jika masyarakat menilai penerapan konsep akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah cukup baik, maka pengelolaan uang desa juga dinilai dapat diterima dan tepat. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: akuntabilitas mempunyai dampak yang menguntungkan terhadap cara pengelolaan keuangan di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa (Mukmin & Maemunah, 2018; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Windyastuti *et al.*, 2019; Angelia *et al.*, 2020).

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

### **2.5.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Keterlibatan masyarakat menjadi pilar utama keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan desa sebagai unsur pengawasan dan ambisi dari masyarakat (Matia Andriani, 2019). Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat yang semakin baik dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan aspek pengawasan dan aspirasi dari masyarakat.

Menurut gagasan penatalayanan, tujuan utama pemerintahan haruslah menjaga masyarakat sebagai prinsipnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan utama pemerintahan secara ideal, diperlukan keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan, penilaian, dan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa (pengurus). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa tentunya berperan aktif dalam meningkatkan pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan ekonomis karena ambisi masyarakat dapat menjadi pedoman peruntukan dana tersebut. Hal ini karena partisipasi masyarakat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat dalam kedudukannya sebagai pemberi dana mempunyai hak menganalisis, menilai, dan memantau penatausahaan dana dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan dana. Oleh karena itu, jika suatu desa mampu memanfaatkan gagasan pelibatan masyarakat dengan baik, maka pengelolaan uang desa juga dapat dianggap berada pada tingkat efektivitas yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses pengelolaan sumber daya keuangan desa. Hal ini disebabkan masyarakat lebih memahami persyaratan yang diperlukan agar proses dapat terlaksana dengan lebih baik, efektif, dan efisien.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Mukmin & Maemunah, 2018; Masruhin & Kaukab, 2019; Matia Andriani, 2019; Angelia *et al.*, 2020).

H3 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

#### **2.5.4 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Setiap manusia mempunyai kemampuan yang unik jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemampuan tersebut dapat berupa informasi, kemampuan (keterampilan), sikap, atau perilaku. Kompetensi perangkat desa adalah kesanggupan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kemampuan infrastruktur desa selalu meningkat, bermanfaat bagi pengelolaan dana daerah (Mardiasmo, 2018).

Menurut teori *stewardship* yang diterapkan dalam konteks pengelolaan keuangan desa digambarkan bahwa pejabat sebagai pelaksana yang diberi kepercayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai motif untuk berusaha semaksimal mungkin memenuhi tujuan utama pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Hal ini dijelaskan sejalan dengan teori *stewardship* dalam konteks pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, pejabat dalam kapasitasnya sebagai pengelola kebijakan wajib bertanggung jawab kepada pimpinan atas segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan. Menurut (Mada *et al.*, 2017) agar pemerintah dapat memberikan outcome yang memuaskan, maka pemerintah perlu berupaya semaksimal mungkin untuk membangun aparatur yang memiliki keinginan dan kompetensi yang tinggi. Dalam pengelolaan keuangan desa, besarnya tanggung jawab meningkat berbanding lurus dengan tingkat keahlian aparatur. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pihak yang berwenang akan mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Selain itu, tingginya tingkat keahlian yang dimiliki aparatur akan

mengarahkannya untuk bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Menurut Masruhin dan Kaukab (2019), aparatur yang berkompeten akan menyelesaikan tugasnya secara ideal, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019).

Hal ini didukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019; Nazar *et al.*, 2021).

H4 : Kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif yaitu untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan (Ghozali, 2018). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan untuk menemukan kausalitas keterkaitan. Objek penelitian ini adalah desa-desa di wilayah Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan menggunakan variabel independen yaitu Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan variabel dependen Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y).

#### **3.2 Populasi dan sampel**

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, aparat desa dan masyarakat desa yang pemilihanya di Kecamatan Brebes.

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel merupakan pemilihan beberapa bagian dari totalitas atau keseluruhan dari populasi. Penarikan sampel pada penelitian

ini dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan metode ini dipilih karena akan mendapatkan hasil pilihan-pilihan tertentu dan akan diperoleh kriteria sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling adalah sebagai berikut :

1. Aparat desa, yang terdiri dari kepala desa karena kepala desa sebagai kunci informasi dan sebagai penggerak utama dalam melaksanakan pembangunan, sekretaris dan bendahara desa karena sekretaris dan bendahara adalah orang-orang yang dekat dengan kepala desa dan juga mempunyai peran untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa
2. Perwakilan masyarakat, karena masyarakat desa merupakan orang-orang yang berada di sekitar pembangunan desa

Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan rumus slovin 1960 sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

**Dimana:**

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*), yaitu sebesar 10%

**Perhitungan:**

$$n = \frac{1.000}{1 + 1.000(0,1)^2}$$

$n = 90,0909090$  dibulatkan 90

Dari perhitungan tersebut maka ditemukan hasil pengambilan sampel 90 responden.

**3.3 Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung pada penelitian dilapangan dan pengamatan secara langsung oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek peneltian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer (Sugiyono, 2020).

**3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan survey dengan cara membagikan kuesioner sebagai instrumen pengambilan data. Metode ini dilakukan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan

kepada responden individu. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert ordinal. Skala likert memiliki empat atau lebih butir-butir pertanyaan yang digabungkan sehingga membentuk sebuah skor/nilai yang menggambarkan sifat individu, seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku. Skala likert ordinal pada penelitian ini terdiri dari lima point dan tingkat penilaian, sebagai berikut:

Sangat setuju (SS)	=5
Setuju (S)	=4
Cukup setuju (CS)	=3
Tidak setuju (TS)	=2
Sangat tidak setuju (STS)	=1

### 3.5 Variabel dan Indikator

Variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran	Sumber
Variabel Independen					
1.	Transparansi	<p>Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Di bidang akuntansi, transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan adanya pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban</p>	<p>1. Ketersediaan informasi dan dokumen</p> <p>2. Kejelasan regulasi</p> <p>3. Keterbukaan</p>	Skala likert 1-5	(Yanto & Aqfir, 2020)

		<p>pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimandatkan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>Transparansi merupakan kebebasan untuk memperoleh informasi publik secara langsung oleh mereka yang membutuhkan</p> <p>(Mardiasmo, 2018).</p>			
--	--	--	--	--	--

2.	Akuntabilitas	<p>Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).</p>	<p>1. Akuntabilitas proses  2. Akuntabilitas hukum dan kejujuran  3. Akuntabilitas program  4. Akuntabilitas kebijakan</p>	Skala likert 1-5	(Yanto & Aqfir, 2020)
----	---------------	--	--	---------------------	-----------------------

3.	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, partisipasi masyarakat	1. Keputusan 2. Pelaksanaan 3. Penyusunan	Skala likert 1-5	(Anam & Elfan, 2019)

		<p>dilandaskan atas kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2018).</p>			
4.	Kompetensi aparatur	<p>Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang dimiliki aparat, baik fisik maupun intelektual yang digunakan untuk menyelesaikan tugasnya, yang mana kemampuan tersebut dapat ditingkatkan melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan</p>	<p>1. Pengetahuan 2. Keahlian 3. Perilaku</p>	<p>Skala likert 1-5</p>	<p>(Anam &amp; Elfan, 2019)</p>

		(Masruhin & Kaukab, 2019).			
Variabel Dependen					
5.	Pengelolaan keuangan dana desa	<p>Pengelolaan keuangan dana desa merupakan serangkaian proses mengatur keuangan dana desa yang dianggarkan pemerintah diawali dari menyusun data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pada pengawasan, evaluasi dan laporan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Pelaksanaan</li> <li>3. Pembiayaan</li> <li>4. Evaluasi</li> <li>5. Pelaporan</li> </ol>	Skala likert 1-5	(Anam & Elfan, 2019)

		<p>pertanggungjawaban  demi tercapainya  tujuan bersama  (Masruhin &amp; Kaukab,  2019).</p>			
--	--	--	--	--	--

### 3.6 Teknik Analisis Data

Proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari data mining dikenal dengan teknik analisis data. Proses ini dilanjutkan dengan mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memilih aspek-aspek data apa yang paling penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami. dipahami oleh diri sendiri selain dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2020). Dalam penyelidikan khusus ini, alat pengolah data yang digunakan adalah SPSS 21.

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, median, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2018).

## **3.6.2 Uji Kualitas Data**

### **3.6.2.1 Uji Validitas Data**

Uji validitas data mungkin dapat membantu dalam menentukan valid atau tidaknya suatu kuisisioner atau angket yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari responden atau sampel penelitian. Apabila pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan dalam kuisisioner mampu mengungkapkan apa saja yang akan dinilai oleh kuisisioner tersebut, maka kuisisioner tersebut dianggap sah. Penerapan analisis faktor dengan menggunakan pendekatan Kaiser-Meyer-Olkin akan memungkinkan Anda mengevaluasi keandalan data yang ditemukan dalam penelitian ini. KMO merupakan indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi parsialnya. Lebih khusus lagi, indekslah yang mengukur jarak antara keduanya. Nilai KMO akan mendekati 1 jika jumlah kuadrat koefisien korelasi parsial antara semua pasangan variabel minimal dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi. Nilai KMO dikatakan memuaskan jika lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2018).

### **3.6.2.2 Uji Reliabilitas Data**

Pengujian reliabilitas data merupakan suatu metode yang digunakan dalam pengukuran kuisisioner yang berfungsi sebagai indikasi suatu variabel atau konstruk. Apabila tanggapan terhadap suatu kuisisioner konsisten satu sama lain, kita mengatakan bahwa kuisisioner tersebut mempunyai hasil yang dapat diandalkan. Menguji reliabilitas suatu kuisisioner untuk menentukan sejauh mana temuan pengukuran tetap konsisten meskipun penilaian dilakukan berulang kali atau lebih untuk gejala yang sama. Saat

pengujian dilakukan, alfa Cronbach dihitung untuk setiap instrumen individu yang membentuk suatu variabel. Jika suatu konstruk atau variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,70 maka dianggap dapat diandalkan (Ghozali, 2018).

### **3.6.3 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian model asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda, dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bisa serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi (Ghozali, 2018). Analisis regresi yang dilakukan dengan metode analisis linier berganda harus mencakup ketentuan uji asumsi klasik.

#### **3.6.3.1 Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas, variabel terikat, atau keduanya mempunyai distribusi normal dalam model regresi dengan cara menguji apakah keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut (Ghozali, 2018), signifikansi temuan uji statistik menjadi berkurang ketika variabel tidak mengikuti distribusi normal. Teknik uji Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam penyelidikan ini untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas K-S, penentuan signifikan atau tidaknya nilai asimtotik (Sig) menjadi landasan pengambilan keputusan. Data penelitian dianggap berdistribusi normal jika nilainya lebih besar dari 0,05. Sebaliknya data penelitian tidak berdistribusi normal jika nilai asimtotiknya signifikan (Sig) yang didefinisikan kurang dari 0,05.

#### **3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2017). Dalam pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara uji *Glejser*. Uji *Glejser* adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. Dasar pengambilan keputusan dengan uji *glejser* adalah:

1. jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data tidak terjadi heteroskedastisitas
2. jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka data terjadi heteroskedastisitas

### **3.6.3.3 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas menentukan apakah model regresi memuat variabel bebas yang berkorelasi tinggi satu sama lain atau berkorelasi sempurna satu sama lain. Masalah multikolinearitas tidak terlihat pada model regresi yang baik, karena ini merupakan tanda kualitas yang kuat. Pada penelitian khusus ini, identifikasi multikolinearitas dilakukan dengan memeriksa nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan VIF lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat bukti multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Hal ini menjadi landasan dalam membuat penilaian terhadap pengujian multikolinearitas.

### **3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Persamaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 AK + \beta_3 PM + \beta_4 KAD + e$$

Keterangan =

Y = Pengelolaan Keuangan Dana Desa

$\alpha$  = constanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

$\beta_1 TP$  = Transparansi

$\beta_2 AK$  = Akuntabilitas

$\beta_3 PM$  = Partisipasi Masyarakat

$\beta_4 KAD$  = Kompetensi Aparat Desa

E = Error

#### 3.6.4.1 Uji Kelayakan Model

##### 3.6.4.1.1 Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh faktor independen yang bertindak bersama-sama (simultan) dapat memberikan dampak terhadap variabel yang dievaluasi (Ghozali, 2018). Uji F merupakan uji signifikan yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen (X1, X2, dan X3) yang disebut juga transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat terhadap variabel dependen (Y), juga dikenal dengan pengelolaan keuangan dana desa. Apabila nilai sig sebesar 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh secara simultan

variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, hipotesis nol  $H_0$  ditolak dan hipotesis alternatif  $H_a$  diterima. Jika nilai sig lebih dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak memberikan pengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan ( $H_0$  diterima, sedangkan  $H_a$  ditolak).

#### **3.6.4.1.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Sejauh mana suatu model mampu memperhitungkan fluktuasi variabel yang coba dijelaskan diukur dengan koefisien determinasi model, disingkat  $R^2$ . Menurut (Ghozali, 2018), nilai koefisien determinasi berada pada kisaran 0 dan 1. Rendahnya nilai  $R^2$  menunjukkan tidak banyak ruang bagi variabel independen untuk menjelaskan varians nilai dependen. variabel. Jika nilainya mendekati satu, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi fluktuasi variabel dependen. Fakta bahwa koefisien mungkin berdampak pada jumlah variabel dependen yang diperhitungkan dalam model merupakan kelemahan utama dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, beberapa akademisi menyarankan untuk menyajikan nilai  $R^2$  yang disesuaikan ketika menentukan model regresi mana yang paling efektif.

Nilainya akan antara 0 dan 1 inklusif. Jika angkanya 1 berarti varian persamaan regresi menjelaskan 100% keseluruhan variasi, artinya variabel Y menyumbang 100% dari total variasi. Sebaliknya, jika nilainya nol, berarti tidak ada variasi total yang dapat dijelaskan oleh varian independen persamaan regresi unggul  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ .

### 3.6.5 Analisis Uji Hipotesis

Analisis ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, adapun jalan analisisnya melalui pengolahan data variabel X dengan variabel Y kemudian dikomparasikan. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa, terdapat dua variabel yaitu:

1. Variabel Bebas : Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat diberi tanda X
2. Variabel Terikat : Pengelolaan Keuangan Dana Desa diberi tanda Y

#### 3.6.5.1 Uji t

Menurut (Ghozali, 2018), uji t merupakan salah satu jenis uji statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel yang diuji. Jika  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel atau nilai probabilitas lebih besar dari ambang batas signifikansi (sig 0,05), maka hipotesis nol diterima dan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Sedangkan hipotesis  $H_0$  diterima jika  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel atau nilai probabilitas lebih besar dari ambang batas signifikansi (sig > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa yang berada di Kecamatan Brebes, setelah mendapat surat izin penelitian dari fakultas, peneliti kemudian mengunjungi Balai Desa yang berada di Kecamatan Brebes untuk menyebarkan kuesioner sebanyak 126 kepada responden dalam waktu kurang lebih satu bulan. Hasil yang diperoleh sebanyak 110 kuesioner yang dapat diolah, 6 kuesioner tidak sesuai kriteria, dan 10 kuesioner tidak kembali. Adapun gambaran penyebaran kuesioner dijelaskan pada tabel 4.1:

**Tabel 4. 1**  
**Penyebaran Kuesioner**

No	Kuesioner	Jumlah
1.	Disebar	126
2.	Tidak Kembali	10
3.	Kembali	116
4.	Tidak Sesuai Kriteria	6
5.	Dapat Diolah	110
<b>Respon rate = <math>110/126*100\%</math></b>		<b>87%</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

#### 4.1.2 Karakteristik Responden

Dari 110 responden peneliti mengelompokkan sebanyak empat karakteristik yaitu usia responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan jabatan. Kemudian data dari empat karakteristik tersebut disajikan dengan statistik deskriptif sebagai berikut :

##### 1. Identitas responden berdasarkan usia responden

Berikut ini adalah data usia responden yang disajikan pada tabel 4.2 :

Tabel 4. 2

##### Usia Responden

Usia Responden	Frekuensi	Presentase
17-30 Tahun	50	45,5%
31-40 Tahun	27	24,5%
41-50 Tahun	20	18,2%
51-60 Tahun	13	11,8%
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dengan total 110 responden dijelaskan bahwa usia responden dengan persentase tertinggi adalah pada usia 17-30 tahun dengan dengan frekuensi sebanyak 50 responden, dan persentase sebesar 45,5%. Sedangkan persentase terendah pada usia 51-60 tahun dengan frekuensi sebanyak 13 responden, dan dengan persentase 11,8%.

##### 2. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin

Berikut ini adalah data jenis kelamin responden yang disajikan pada tabel 4.3:

**Tabel 4. 3**

**Jenis Kelamin Responden**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Pria	70	63,6%
Wanita	40	36,4%
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dengan total 110 responden dijelaskan bahwa jenis kelamin responden dengan persentase tertinggi adalah pria dengan frekuensi sebanyak 70 responden, dan persentase sebesar 63,6%. Sedangkan persentase terendah pada jenis kelamin wanita dengan frekuensi sebanyak 40 responden, dan dengan persentase 36,4%. Hal tersebut menunjukkan penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin pria dengan selisih 30 responden dengan kelamin wanita.

**3. Identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir**

Berikut ini adalah data pendidikan terakhir responden yang disajikan pada tabel 4.4:

**Tabel 4. 4**

**Pendidikan Terakhir Responden**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
SMA	45	40,9%
D3	15	13,6%
S1	50	45,5%
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dengan total 110 responden dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden dengan persentase tertinggi adalah tingkat S1 dengan frekuensi sebanyak 50 responden, dan presentase sebesar 45,5%. Sedangkan persentase terendah pada tingkat D3 dengan frekuensi sebanyak 15 responden, dan persentase sebesar 13,6%. Hal tersebut menunjukkan penelitian ini didominasi oleh tingkat pendidikan terakhir S1.

#### 4. Identitas responden berdasarkan jabatan

Berikut ini adalah data jabatan responden yang disajikan pada tabel 4.5:

Tabel 4. 5

#### Jabatan Responden

Jabatan	Frekuensi	Presentase
Aparat Desa : 1. Kepala Desa : 18 2. Sekretaris : 14 3. Bendahara : 11	43	39,1%
Masyarakat	67	60,9%
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dengan total 110 responden dijelaskan bahwa jabatan responden dengan persentase tertinggi adalah masyarakat dengan frekuensi sebanyak 67 responden, dan persentase sebesar 60,9%. Sedangkan persentase terendah adalah aparat desa dengan frekuensi sebanyak 43 responden, dan persentase sebesar 39,1%. Hal tersebut menunjukkan penelitian ini didominasi oleh masyarakat.

## 4.2 Analisis Deskriptif Variabel

### 4.2.1 Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Analisis deskriptif jawaban responden digunakan untuk menjelaskan secara detail tentang indikator atau masing-masing pertanyaan yang telah diisi responden dengan menggunakan ketentuan skal likert 1-5. Selain itu tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak responden dan berapa banyak persentasenya dalam menjawab pertanyaan atau memberi tanggapan kuesioner dengan menggunakan ketentuan skala likert 1-5 antara lain Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

#### 4.2.1.1 Deskripsi Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)

Pada variabel Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen memiliki 5 indikator dengan 15 pertanyaan, tanggapan responden dilihat dari rata-rata jawaban yang diperoleh dan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4. 6  
Rata-rata Jawaban Variabel Pengelolaan Dana Desa

No.	Pengelolaan Dana Desa	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1.	Y1	0	0	25	69	16	3,91	Setuju
	Y2	0	0	21	54	35	4,12	Setuju
	Y3	0	0	15	62	33	4,16	Setuju
2.	Y4	0	0	7	71	32	4,22	Setuju
	Y5	0	9	3	84	23	4,18	Setuju
3.	Y6	0	0	2	65	43	4,37	Setuju
	Y7	0	0	4	81	25	4,19	Setuju
4.	Y8	0	0	2	63	45	4,39	Setuju
	Y9	0	0	5	85	20	4,13	Setuju
	Y10	0	0	4	69	37	4,30	Setuju

5.	Y11	0	0	2	75	33	4,28	Setuju
	Y12	0	0	5	68	37	4,29	Setuju
	Y13	0	0	4	78	28	4,21	Setuju
	Y14	0	0	5	61	44	4,35	Setuju
	Y15	0	0	4	77	29	4,22	Setuju
<b>Nilai Rata-rata</b>							<b>4,22</b>	<b>Setuju</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Pada tabel 4.6 dijelaskan nilai rata-rata jawaban responden pada variabel Pengelolaan Dana Desa sebesar 4,22 yang berarti setuju. Dalam hal ini responden setuju untuk melakukan, perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pengelolaan dana desa.

#### 4.2.1.2 Deskripsi Variabel Tranparansi (X1)

Pada variabel Transparansi sebagai variabel independen memiliki 3 indikator dengan 11 pertanyaan, tanggapan responden dilihat dari rata-rata jawaban yang diperoleh dan dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 7**

#### **Rata-rata Jawaban Variabel Transparansi**

No.	Transparansi (X1)	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1.	X1	0	0	20	77	13	3,93	Setuju
	X2	0	0	8	62	40	4,29	Setuju
	X3	0	0	3	73	34	4,28	Setuju
2.	X4	0	0	0	49	61	4,55	Sangat Setuju
	X5	0	0	0	66	44	4,40	Setuju
	X6	0	0	0	42	68	4,61	Sangat Setuju
	X7	0	0	1	62	47	4,41	Setuju
3.	X8	0	0	0	49	61	4,55	Sangat Setuju
	X9	0	0	1	59	50	4,44	Setuju
	X10	0	0	0	57	53	4,48	Setuju
	X11	0	0	3	55	52	4,44	Setuju
<b>Nilai Rata-rata</b>							<b>4,39</b>	<b>Setuju</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Pada tabel 4.7 dijelaskan nilai rata-rata jawaban responden pada variabel Transparansi sebesar 4,39 yang berarti setuju. Dalam hal ini responden setuju untuk melakukan ketersediaan informasi dan dokumen, kejelasan regulasi, dan keterbukaan transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

#### 4.2.1.3 Deskripsi Variabel Akuntabilitas (X2)

Pada variabel Akuntabilitas sebagai variabel independen memiliki 4 indikator dengan 8 pertanyaan, tanggapan responden dilihat dari rata-rata jawaban yang diperoleh dan dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 4. 8**  
**Rata-rata Jawaban Variabel Akuntabilitas**

No.	Akuntabilitas (X2)	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1.	X1	0	0	38	61	11	3,75	Setuju
	X2	0	0	36	40	34	3,98	Setuju
	X3	0	0	25	59	26	4,00	Setuju
2.	X4	0	0	15	56	39	4,21	Setuju
	X5	0	0	9	62	39	4,27	Setuju
	X6	0	0	5	68	37	4,29	Setuju
3.	X7	0	0	5	70	35	4,27	Setuju
4.	X8	0	1	1	70	38	4,31	Setuju
<b>Nilai Rata-rata</b>							<b>4,13</b>	<b>Setuju</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Pada tabel 4.8 dijelaskan nilai rata-rata jawaban responden pada variabel Akuntabilitas sebesar 4,13 yang berarti setuju. Dalam hal ini responden setuju untuk melakukan akuntabilitas proses, akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan terhadap pengelolaan dana desa.

#### 4.2.1.4 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)

Pada variabel Partisipasi Masyarakat sebagai variabel independen memiliki 3 indikator dengan 9 pertanyaan, tanggapan responden dilihat dari rata-rata jawaban yang diperoleh dan dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 4. 9**

#### **Rata-rata Jawaban Variabel Partisipasi Masyarakat**

No.	Partisipasi Masyarakat (X3)	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1.	X1	0	0	19	78	13	3,94	Setuju
	X2	0	0	15	47	48	4,30	Sangat Setuju
2.	X3	0	0	8	64	38	4,27	Setuju
	X4	0	0	3	62	45	4,38	Setuju
	X5	0	0	1	66	43	4,38	Setuju
3.	X6	0	0	5	49	56	4,46	Sangat Setuju
	X7	0	0	4	58	48	4,40	Setuju
	X8	0	0	6	55	49	4,39	Setuju
	X9	0	0	3	51	56	4,48	Sangat Setuju
<b>Nilai Rata-rata</b>							<b>4,33</b>	<b>Setuju</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Pada tabel 4.9 dijelaskan nilai rata-rata jawaban responden pada variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 4,33 yang berarti setuju. Dalam hal ini responden setuju untuk melakukan keputusan, pelaksanaan, dan penyusunan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

#### 4.2.1.5 Deskripsi Variabel Kompetensi Aparat Desa (X4)

Pada variabel Kompetensi Aparat Desa sebagai variabel independen memiliki 3 indikator dengan 13 pertanyaan, tanggapan responden dilihat dari rata-rata jawaban yang diperoleh dan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4. 10

**Rata-rata Jawaban Variabel Kompetensi Aparat Desa**

No.	Kompetensi Aparat (X4)	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1.	X1	0	0	15	79	16	4,00	Setuju
	X2	0	0	13	47	50	4,33	Sangat Setuju
	X3	0	0	10	74	26	4,14	Setuju
2.	X4	0	0	12	39	59	4,42	Sangat Setuju
	X5	0	0	4	70	36	4,29	Setuju
	X6	0	0	7	45	58	4,46	Sangat Setuju
	X7	0	0	5	62	43	4,34	Setuju
	X8	0	0	6	49	55	4,44	Sangat Setuju
	X9	0	0	3	53	54	4,46	Sangat Setuju
3.	X10	0	0	4	53	53	4,44	Setuju
	X11	0	0	5	55	50	4,40	Setuju
	X12	0	0	7	51	52	4,40	Sangat Setuju
	X13	0	0	3	55	52	4,44	Setuju
<b>Nilai Rata-rata</b>							<b>4,35</b>	<b>Setuju</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Pada tabel 4.10 dijelaskan nilai rata-rata jawaban responden pada variabel Kompetensi Aparat Desa sebesar 4,35 yang berarti setuju. Dalam hal ini responden setuju untuk melakukan pengetahuan, keahlian, dan perilaku kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, dan maksimum.

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif :

**Tabel 4. 11**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std.Deviation</b>
Transparansi	110	42	55	48,42	4,048
Akuntabilitas	110	27	39	33,11	3,736
Partisipasi masyarakat	110	33	45	39,01	3,684
Kompetensi Aparat Desa	110	49	65	56,63	4,481
Pengelolaan Dana Desa	110	56	70	63,38	4,194

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa n adalah jumlah sampel yaitu sebanyak 110 responden. Masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

Variabel Pengelolaan dana desa (Y) sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 56 dan nilai maksimal sebesar 70 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 63.38 hal tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa cukup memadai. Selanjutnya standar deviasi yang dimiliki sebesar 4.194 lebih kecil dari nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan variasi yang rendah atau perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum.

Selanjutnya pada variabel Transparansi (X1) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 42 dan nilai maksimum sebesar 55 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 48.42 hal tersebut menunjukkan bahwa Transparansi terhadap pengelolaan dana desa cukup memadai. Selanjutnya standar deviasi yang dimiliki sebesar 4.048 lebih kecil dari nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan variasi yang rendah atau perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum.

Selanjutnya pada variabel Akuntabilitas (X2) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 27 dan nilai maksimum sebesar 39 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 33.11 hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas terhadap Pengelolaan dana desa cukup memadai. Selanjutnya standar deviasi yang dimiliki sebesar 3.736 lebih kecil dari nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan variasi yang rendah atau perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum.

Selanjutnya pada variabel Partisipasi Masyarakat (X3) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 33 dan nilai maksimum sebesar 45 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 39.01 hal tersebut menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan dana desa cukup memadai. Selanjutnya standar deviasi yang dimiliki sebesar 3.684 lebih kecil dari nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan variasi yang rendah atau perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum.

Selanjutnya pada variabel Kompetensi Aparat Desa (X4) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 49 dan nilai maksimum sebesar 65 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 56.63 hal tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa cukup memadai. Selanjutnya standar deviasi yang dimiliki sebesar 4.481 lebih kecil dari nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan variasi yang rendah atau perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum.

### **4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data**

#### **4.3.2.1 Hasil Uji Validitas**

Uji validitas data bertujuan untuk mengukur kevalidan data kuesioner yang diperoleh. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor dengan metode KMO (Kaiser Meyer Olkin). KMO yaitu, indek perbandingan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi parsialnya. Jika jumlah kuadrat koefisien korelasi parsial diantara seluruh pasangan variabel bernilai kecil jika dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi, maka akan menghasilkan nilai KMO mendekati 1. Nilai KMO dianggap mencukupi jika lebih dari 0,5. Berikut adalah tabel hasil dari uji validitas :

Tabel 4. 12

**Hasil uji Validitas Data**

Variabel	KMO	Sig. Bartlett's Test of Sphericity	Keterangan
Transparansi	0,833	0,001	Valid
Akuntabilitas	0,882	0,001	Valid
Partisipasi Masyarakat	0,849	0,001	Valid
Kompetensi Aparat	0,803	0,001	Valid
Pengelolaan Dana Desa	0,760	0,001	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel memiliki nilai KMO > 0,050 dan nilai Sig. *Bartlett's Test of Sphericity* < 0,050, artinya analisis faktor dapat dipakai dan dilanjutkan untuk menjelaskan lima variabel dalam penelitian ini atau bisa dikatakan valid.

#### 4.3.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kestabilan antara hasil penelitian yang dilakukan dalam kuesioner, pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai Cronbach Alpha, jika nilai Cronbach Alpha > 0,6 maka kuesioner dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 13**

**Hasil Uji Reliabilitas Data**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Transparansi	0,900	Reliabel
Akuntabilitas	0,881	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,877	Reliabel
Kompetensi Aparat Desa	0,840	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa	0,802	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan masing-masing variabel pada penelitian ini memiliki nilai cronbach alpha > 0,6 sehingga dapat dinyatakan variabel pada penelitian ini dari waktu ke waktu terbukti reliabel.

### 4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.3.1 Hasil Uji Normalitas

Cara yang digunakan pada uji normalitas untuk mengetahui suatu data berdistribusi normal atau tidaknya dengan menggunakan uji *one sample kolmogorov-smirnov test*. Jika hasil dari uji *kolmogorov-smirnov* dengan hasil nilai asymp signifikansi (Sig) lebih besar > dari 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika hasil dari uji *kolmogorov-smirnov* dengan hasil nilai asymp signifikansi (Sig) lebih kecil < dari 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4. 14**

**Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

		<b>Unstandardized Residual</b>
N		110
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.06952052
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.056
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>		<b>.097<sup>c,d</sup></b>

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Pada tabel 4.14 berdasarkan hasil uji Normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov berdistribusi normal karena diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,097 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05.

**4.3.3.2 Hasil Uji Multikolonieritas**

Uji Multikolonieritas bisa dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika hasil dari tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 15**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

<b>Variabel</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
Transparansi	0,914	1,094	Tidak Terjadi Multikolonieritas
Akuntabilitas	0,914	1,094	Tidak Terjadi Multikolonieritas
Partisipasi Masyarakat	0,968	1,033	Tidak Terjadi Multikolonieritas
Kompetensi Aparat Desa	0,981	1,020	Tidak Terjadi Multikolonieritas

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Pada tabel 4.15 menunjukkan hasil dari uji Multikolonieritas pada masing-masing variabel. Nilai tolerance pada seluruh variabel  $> 0,1$ , begitu pula dengan nilai VIF seluruh variabelnya memiliki nilai  $< 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas, sehingga variabel tersebut layak digunakan untuk penelitian selanjutnya.

#### **4.3.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, uji heteroskedastisitas bisa dilihat melalui uji glejser, jika hasil dari sig  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas glejser dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 16**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser**

<b>Variabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
Transparansi	0,860	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Akuntabilitas	0,209	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Partisipasi Masyarakat	0,509	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kompetensi Aparat Desa	0,115	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Pada tabel 4.16 menunjukkan nilai Sig. dari masing-masing masing variabel hasil uji heteroskedastisitas lebih dari 0,05 maka pengujian model regresi dalam peneliiian ini dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji analisis regresi linier berganda :

**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

<b>Keterangan</b>	<b>B</b>
(Constant)	56,045
Transparansi	0,145
Akuntabilitas	-0,096
Partisipasi Masyarakat	-0,043
Kompetensi Aparat Desa	0,092

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.17 maka hasil uji analisis regresi linier berganda dapat diperoleh dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 56,045 + 0,145X_1 - 0,096X_2 - 0,043X_3 + 0,092X_4 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi yang telah disajikan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 56,045 hal tersebut menunjukkan apabila variabel independen dalam penelitian ini adalah nol, maka nilai konstanta sebesar 56,045.
2. Nilai koefisien pada variabel Transparansi (X1) sebesar 0,145 yang bertanda positif, maka dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan variabel Transparansi akan meningkatkan variabel Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,145.
3. Nilai koefisien pada variabel Akuntabilitas (X2) sebesar -0,096 yang bertanda negatif, maka dapat diartikan bahwa setiap penurunan satu kesatuan variabel Akuntabilitas akan menurunkan variabel Pengelolaan Dana Desa sebesar -0,096.
4. Nilai koefisien pada variabel Partisipasi Masyarakat (X3) sebesar -0,043 yang bertanda negatif, maka dapat diartikan bahwa setiap penurunan satu kesatuan variabel Partisipasi Masyarakat akan menurunkan variabel Pengelolaan Dana Desa sebesar -0,043.
5. Nilai koefisien pada variabel Kompetensi Aparat Desa (X4) sebesar 0,092 yang bertanda positif, maka dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan variabel Kompetensi Aparat Desa akan meningkatkan variabel Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,092.

### 4.3.5 Hasil Uji Kelayakan Model

#### 4.3.5.1 Hasil Uji Statistik Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menentukan signifikansi pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali (2021)). Uji F dapat dilakukan jika  $\text{sig} < 0,05$  maka dinyatakan model tersebut layak sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 18

Hasil Uji F

Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	59,307	4	14,827	3,350	0,013 <sup>b</sup>
Residual	464,664	105	4,425		
Total	523,971	109			

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan nilai sig 0,013 yang berarti  $0,013 < 0,05$  maka dinyatakan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti variabel independen yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Pengelolaan Dana Desa.

#### 4.3.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali (2021)). Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bisa dilihat pada adjusted r square, hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 19**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

<b>Model</b>	<b>R Square</b>
1	0,113

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dengan nilai r square sebesar 0,113 atau 11,3% yang berarti variabel Pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa, sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**4.3.6 Hasil Uji Hipotesis**

**4.3.6.1 Hasil Uji Statistik t**

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Jika sig < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 20**

**Hasil Uji t**

<b>Variabel</b>	<b>B</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
Transparansi	0,145	2,779	0,006	Diterima
Akuntabilitas	-0,096	-1,705	0,091	Ditolak
Partisipasi Masyarakat	-0,043	-768	0,444	Ditolak
Kompetensi Aparat Desa	0,092	2,016	0,046	Diterima

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan hasil uji t dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Nilai Sig. pada variabel Transparansi adalah 0,006. Hasil tersebut berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima karena nilai Sig.  $0,006 < 0,05$  oleh sebab itu variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Nilai Sig. pada variabel Akuntabilitas adalah 0,091. Hasil tersebut berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak karena nilai Sig.  $0,091 > 0,05$  oleh sebab itu variabel Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Nilai Sig. pada variabel Partisipasi Masyarakat adalah 0,444. Hasil tersebut berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak karena nilai Sig.  $0,444 > 0,05$  oleh sebab itu variabel Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

4. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa

Nilai Sig. pada variabel Kompetensi Aparat Desa adalah 0,046. Hasil tersebut berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima karena nilai Sig.  $0,046 < 0,05$  oleh sebab itu variabel Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa terhadap variabel dependen yaitu Pengelolaan Dana Desa.

##### **4.4.1 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, karena pada uji parsial diketahui nilai signifikansi variabel transparansi sebesar  $0,006 < 0,05$ , artinya semakin besar atau tingginya transparansi yang dilakukan mempengaruhi tinggi rendahnya pengelolaan dana desa.

Menurut teori stewardship, steward adalah orang yang akuntabel dan dapat dipercaya. Karena hal ini dapat dicapai melalui penerapan konsep transparansi, teori stewardship berpendapat bahwa aparat desa adalah pelayan. Dimana pemerintah desa menyediakan informasi mengenai pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa, kepada masyarakat luas dan memberikan akses yang luas terhadap informasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya asimetri informasi yang dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Pengurus akan selalu berupaya menerapkan konsep transparansi yang tinggi agar dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya inkonsistensi dalam pengelolaan uang desa.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukmin & Maemunah (2018) dan Sukmawati & Nurfitriani (2019) yang berpendapat bahwa keterbukaan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat secara benar dan tepat akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, ada pengaruh baik keterbukaan terhadap pengelolaan uang bagi masyarakat. Di sisi lain, hal ini bertentangan dengan temuan penelitian Angelia (2020) dan Yanto & Aqfir (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat keterbukaan tidak memberikan dampak menguntungkan terhadap pengelolaan dana desa.

#### **4.4.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, karena pada uji parsial diketahui nilai signifikansi variabel akuntabilitas sebesar  $0,091 > 0,05$ , artinya semakin besar atau tingginya akuntabilitas yang dilakukan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya pengelolaan dana desa.

Hal ini tidak sesuai dengan teori stewardship yang menyatakan bahwa steward (pegawai desa) wajib melaporkan hasil kinerja program kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan wujud tanggung jawab pengurus terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa pada masyarakat desa. Namun penelitian ini menemukan hasil yang berbeda, yang menunjukkan bahwa adanya akuntabilitas tidak serta merta menghasilkan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Hal ini terjadi karena aparat desa belum akuntabel dan tidak melaporkan pelaksanaan pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah secara sistematis. Selain itu, aparat desa juga belum

menyiapkan laporan pengelolaan dana desa secara memadai. Hal ini disebabkan karena banyak perangkat desa yang mengakui bahwa mereka telah mengelola dana desa secara akuntabel, namun secara umum masih banyak masyarakat yang menilai ada beberapa perangkat desa yang tidak jujur; beberapa pejabat desa sendiri berpendapat ada yang tidak beres. Meski demikian, masih ada sebagian pejabat yang tidak jujur dalam pelaporan keuangannya.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Yanto & Aqfir (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena perangkat desa belum mampu mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan dana desa. pengelolaan dana secara tertib kepada masyarakat atau pemerintah, dimulai dari proses perencanaan. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana kegiatan pembangunan desa dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Windyastuti (2019) dan Angelia (2020) yang berpendapat bahwa akuntabilitas berperan dalam penatausahaan uang desa, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi.

#### **4.4.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, karena pada uji parsial diketahui nilai signifikansi variabel partisipasi masyarakat sebesar  $0,444 > 0,05$ , artinya semakin besar atau tingginya partisipasi masyarakat yang dilakukan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya pengelolaan dana desa.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip penatalayanan (stewardship), yang menyatakan bahwa tujuan utama tata kelola pemerintahan adalah memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai aktor utama. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah semaksimal mungkin, diperlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan, evaluasi, dan pengawasan terhadap kerja perangkat desa. Di sisi lain, penelitian ini menghasilkan temuan tersendiri yang menunjukkan bahwa adanya pelibatan masyarakat tidak serta merta membawa perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini terjadi karena keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dan penatausahaan uang desa masih sangat minim. Hal ini berdampak pada dukungan masyarakat terhadap berbagai kegiatan yang akan dilakukan dengan keuangan desa. Besar kecilnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa variabel yang berbeda. Salah satu permasalahan tersebut adalah kurangnya sosialisasi tentang program dana desa di pihak pemerintah desa, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang program dana desa.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian oleh Yanto & Aqfir (2020) dan Nazar (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa akibat adanya praktik KKN perangkat desa yang menjadikan dana desa pengelolaannya tidak efektif dan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Temuan ini didukung oleh fakta bahwa pernyataan di atas didukung oleh penelitian di atas. Namun menurut penelitian Matia Andriani (2019) yang

menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berdampak pada penyelenggaraan anggaran desa, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan di atas.

#### **4.4.4 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, karena pada uji parsial diketahui nilai signifikansi variabel kompetensi aparat desa sebesar  $0,046 < 0,05$ , artinya semakin besar atau tingginya kompetensi aparat desa yang dilakukan mempengaruhi tinggi rendahnya pengelolaan dana desa.

Menurut teori stewardship, pejabat sebagai eksekutif yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan mempunyai motif untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tujuan utama pemerintahan, yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan teori mengapa pejabat mempunyai motivasi tersebut. Selain itu, mengingat perannya sebagai pengelola kebijakan, aparatur berkewajiban untuk bertanggung jawab atas seluruh operasi pengelolaan yang dilakukan atas nama prinsip. Oleh karena itu, agar pemerintah dapat memberikan hasil terbaik, pemerintah harus mengerahkan upaya semaksimal mungkin untuk melatih pejabat yang memiliki motivasi tinggi dan kompetensi tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruhin & Kaukab (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki pegawai sesuai dengan tugas yang diembanya akan selalu mendorong pegawai untuk bekerja dengan efektif, efisien, dan produktif. Pegawai yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kinerja pengelolaan keuangan akan

meningkat. Sehingga kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sweetenia, 2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan temuan kajian yang dilakukan pada topik dampak transparansi, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, dan kompetensi perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes:

Transparansi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Hal ini menunjukkan transparansi dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan transparansi juga memberikan kemudahan akses informasi yang baik dan benar.

Akuntabilitas ditetapkan tidak berpengaruh positif atau besar terhadap penyelenggaraan dana desa di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Hal ini terjadi karena banyak perangkat desa yang menyatakan telah menangani uang desa secara bertanggung jawab, padahal masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ada pejabat desa yang tidak jujur. Bahkan sebagian aparat yang bekerja di desa juga berpendapat serupa, yakni masih ada sebagian aparat yang kurang jujur dalam melaporkan. Keuangan desa.

Di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, keterlibatan masyarakat terbukti tidak memberikan pengaruh yang menguntungkan atau berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pendapatan desa. Hal ini terjadi akibat tidak adanya sosialisasi dari

pihak pemerintah desa terkait program dana desa, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program dana desa.

Tingkat keahlian yang dimiliki perangkat desa terbukti memberikan dampak konstruktif dan substansial terhadap penyelenggaraan keuangan desa di Kabupaten Brebes dan seluruh Kabupaten Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa para pejabat, dalam kapasitas mereka sebagai manajer kebijakan, dapat bertanggung jawab kepada kepala sekolah atas seluruh operasi manajemen. Selain itu, perangkat desa juga menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan bermanfaat. Aparatur juga mampu melaksanakan tugas yang diberikan.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, maka dapat diambil implikasi sebagai berikut :

### **5.2.1 Implikasi Praktis**

Tingginya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa berpotensi memberikan dampak terhadap pengelolaan tersebut. Dengan meningkatkan keterbukaan, khususnya dalam pengelolaan uang desa, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya, dan memastikan setiap kritik atau gagasan masyarakat selalu menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana desa. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa meningkat sebagai akibat langsung dari meningkatnya keterbukaan pemerintah desa terhadap pengelolaan uang daerah. Untuk

meningkatkan tingkat keterbukaan dalam operasional pemerintahan desa, dibangun papan informasi sebagai alat penyebaran informasi.

Akuntabilitas tidak dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai operasional dan kinerja pemerintah. Akuntabilitas mengharuskan pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah harus terus bertanggung jawab dan memberikan informasi terkini kepada masyarakat tentang penyelenggaraan dana desa secara terorganisir.

Keterlibatan masyarakat sama sekali belum berperan dalam peningkatan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan hemat biaya. Karena masyarakat tidak mampu mengontrol administrasi uang desa, hal ini mengakibatkan pengelolaan dana desa menjadi kacau. Partisipasi tidak hanya meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan desa, tetapi juga menjadikan pengelola dana desa lebih tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi juga diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.

Aparat masyarakat dapat memberikan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan pengelolaan yang berlangsung di desa. Perangkat desa melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan bermanfaat. Aparat desa wajib terus memberikan motivasi kepada aparaturnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif, efisien, dan produktif. Pegawai yang mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

### **5.2.2 Implikasi Teoritis**

Secara teori, penerapan tata kelola publik berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan desa, baik secara positif maupun negatif. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kompetensi merupakan empat pilar yang menjadi landasan pemerintahan publik yang baik. Penggunaan gagasan ini dalam tata kelola publik dapat membantu memastikan bahwa pengadministrasian dana desa dilakukan secara tertib dan sesuai dengan peraturan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat seiring dengan semakin terbukanya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berkat konsep transparansi. Menurut konsep tanggung jawab, penanggung jawab pengelolaan uang desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aturan terkait dipatuhi dan juga harus mematuhi persyaratan tersebut. Meskipun tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat masih relatif rendah, namun peran serta dalam penyelenggaraan keuangan desa masih tetap penting. Keterlibatan ini diperlukan agar penggunaan dan pengelolaan dana dapat lebih terarah. Karena diatur dalam asas kompetensi, maka pemerintah desa wajib membentuk aparatur yang berkompeten dan bermotivasi tinggi agar dapat memberikan hasil yang dapat diterima. Hal ini mengharuskan pemerintah mengerahkan upaya maksimalnya.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Ada keterbatasan pada riset ini, antara lain yaitu:

Pengolahan informasi untuk keperluan penelitian ini bersumber dari tanggapan yang diberikan responden terhadap kuesioner yang diedarkan. Hasil pengolahan

informasi hanya dapat dibandingkan dengan tanggapan yang diberikan dalam kuesioner; namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa hasil dari respons yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

#### **5.4 Agenda Penelitian Mendatang**

Hasil dari R Square menunjukkan nilai sebesar 11,3% yang artinya nilai tersebut kecil ataupun terdapat variabel independen lain yang menerangkan serta tidak diteliti dalam riset ini, sehingga riset berikutnya diharapkan buat menaikkan variabel independen lain yang bisa pengaruhi pengelolaan dana desa semacam peran perangkat desa serta sistem akuntansi keuangan desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, R. S., Rahayu, S., & Ak, M. (2020). Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( studi kasus pada pemerintah desa di kecamatan cianjur tahun 2019 ) the influence of transparency , accountability and participation of village financial management ( a case study at village government cianjur sub-district in 2019 ). *e-Proceeding of Management*, Vol 7(1), 1008–1014. ISSN: 2355-9357.
- Anita Firdaus, Suharno, S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol 15(3), 291–300.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *VJRA: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61–70. P-ISSN: 2337-537X; E-ISSN 2686-1941.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol 2(1), 63–76. p-ISSN: 2685-1059, e-ISSN: 2685-1059.
- Aulia Rakhma Larasati, M. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4(3), P-ISSN 2622-2191, E-ISSN 2622-2205.
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2017). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan.Dana.Desa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol 3(4),426-444. p-ISSN 2548-298X, e-ISSN 2548-5024. DOI: 10.24034/j25485024.y2019.v3.i4
- Devi, Wijayanti, I., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *JAM: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol 20(01), 1–11. p-ISSN: 1693-8364,e-ISSN: 2527-8320. <https://doi.org/10.36406/jam.v20i01681>.
- Fauzana Azima, Annie Mustika Putri, Intan Putri Azhari. (2022). Akuntabilitas transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS* Vol 7(2), 105–116, p-ISSN: 2548-7523, e-ISSN: 2613-8956.
- Guspul, A. (2019). Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana

- Desa ( studi empiris pada seluruh desa di kecamatan mrebet kabupaten purbalingga ). *Journal Of Economic, Business and Engineering*, Vol 1(1), 49–59.
- Hanif Dwi Kunchahyo, I Gede Made Artha Dharmakarja. (2022). Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *AKUNTASIKU*. Vol 1(4), 299–319.
- Irwadi, M., Welly, K., Permana, A., Studi, P., & Universitas, A.. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol 7(1), P-ISSN: 2579-969X; E-ISSN: 2622-7940.
- Kadek, N. (2022). Luh Komang Merawati, Ida Ayu Nyoman Yuliasuti. Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi*, Vol 6(1), 78–99.
- Khasanah, A. N., & Marisan, I. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa ( ADD ), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ). *JRA: JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI*, Vol 6(1), 32–47.
- Liana, S. A., & Nugroho, W. S. (2022). Partisipasi Masyarakat , Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kaliangkrik ). *Business and Economics Conference In Utilization of Modern Technology*. p-ISSN: 2622-9404, e-ISSN: 2828-0725, 633–647.
- Mahayani, N. L. A., & Universitas, B. Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Village Fund In The Context Of. *JIAB: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol 12(2), 129–144. p-ISSN: 2302-514X, e-ISSN: 2303-1018. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p07>.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). ( Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan. *Journal of Economic, Business and Engineering*, Vol 1(1), 118–130.
- Mukmin, M. N., Maemunah, S., Studi, P., Fakultas, A., Universitas, E., & Bogor, D. (2018). Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja dan Ciawi. *JURNAL AKUNIDA*, Vol 4(2), 73–85. ISSN: 2442-3033.
- Nazar, S. N., Wulandari, R., Lestari, A., Pamulang, U., & Selatan, T. (2021). Competencies On Execution Of Village Government Authorities , Transparency , Public Participation and Accountability Of Villages Fund Management. *EAJ: Economic and Accounting Journal*, Vol 4(1), 59–70. ISSN: 2615-7888.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/EAJ>.

- Nurfitri, A. B., & Kunci, K. (2023). Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH*, Vol 6(2), 1794–1805. e-ISSN: 2599-3410, p-ISSN: 2614-3259. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Putri, E. H. (2022). *PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( Studi Empiris Seluruh Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok ) THE EFFECT OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ON ( Empirical Study of All Nagari in District X Koto Singkarak , Solok Regency ). CEMERLANG*, Vol 2(3), 164–184. e-ISSN: 2962-4797, p-ISSN: 2962-3596.
- Ridha Fajri, Restu Agusti, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol 17(2), 209–227.
- Sapeni, A., & Musue, D. P. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Tingkat Pendidikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Pada Aparat Desa Se Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una ). *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, Vol 3(2). <https://doi.org/10.31314/jsap.3.2.59-65.2020>
- Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>
- Sihaya & Lalaun. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Punagaya Kecamatan Bangala Kabupaten Jonoponto. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol 6(11), 74–80. ISSN: 2088-6969.
- Solihah, F. Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan. *Jurnal Risma*, Vol 2(1), 136–154.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut ). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM* Vol 2(1), 52-66.

- Sweetenia, A. M. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, Vol 17(1), 44–56. p-ISSN: 1693-5950, e-ISSN: 2579-647X. <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/bisnisekonomi>.
- Yanto, E., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa The Influence Of Transparency, Participation And Accountability On The Performance Of Village Fundallocation Management And Village Fund. *Economy Deposit Journal Vol 2(2)*, 67-76.

